

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2014, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan laporan keuangan semester 2 tahun 2020 ini, perlu kami kemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan per 31 desember 2020. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp.583.880.055,00 atau 122,52 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.476.544.000,00 dan Realisasi Belanja adalah sebesar Rp.15.997.097.759,00 atau 88,23 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.131.309.396,00.
2. Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Dari Laporan Operasional tersebut di informasikan bahwa nilai Pendapatan - Lo adalah sebesar Rp.583.880.055,00 serta nilai Beban - Lo adalah sebesar Rp.18.348.216.887,00.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perkebunan Provinsi per 31 desember 2020. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp.33.144.627.309,11. Kewajiban adalah sebesar Rp.20.971.346,00. Dan ekuitas dana adalah sebesar Rp.33.123.655.963,11.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diinformasikan bahwa nilai Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp.33.123.655.963,11.

5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal – hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi dan penjelasan pos - pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan semester 2 Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, Januari 2021

**PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**Ir. H. SRI SUWANTO, M.S**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670416 199803 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	
Pernyataan Tanggung jawab	
Ringkasan	
Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan)	
Neraca (perbandingan)	
Catatan atas Laporan Keuangan	
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
<b>Bab II</b>	<b>Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD</b>
2.1	Ekonomi makro
2.2	Kebijakan keuangan
2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
<b>Bab III</b>	<b>Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan</b>
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
<b>Bab IV</b>	<b>Kebijakan akuntansi</b>
4.1	Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
<b>Bab V</b>	<b>Penjelasan pos-pos laporan keuangan</b>
5.1	Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan
5.1.1	Pendapatan
5.1.2	Belanja
5.1.3	Aset
5.1.4	Kewajiban
5.1.5	Ekuitas Dana

---

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

---

Bab VI Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan

---

Bab VII Penutup

---

Daftar Lampiran

---

## INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan		
Pendapatan	V.1.1.a	Pendapatan Asli Daerah
Belanja	V.1.2	Belanja
	a	Belanja Pegawai
	b	Belanja Barang dan Jasa
	c	Belanja Modal
Aset	V.1.3	Aset lancar
	1	Kas di Bendahara Penerimaan
	2	Kas di Bendahara Pengeluaran
	3	Piutang Lain-lain
	4	Persediaan
	5	Aset Tetap
	5.1	Tanah
	5.2	Peralatan dan Mesin
	5.3	Gedung dan Bangunan
	5.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	5.5	Aset Tetap Lainnya
Hutang	V.1.4	Hutang Jangka Pendek
Ekuitas Dana	V.1.5	Ekuitas Dana
	1	Ekuitas Dana Lancar
	2	Ekuitas Dana Investasi

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

---

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan semester 2 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2021

**PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**Ir. H. SRI SUWANTO, M.S**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670416 199803 1 002

## RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan ini telah di susun dan di sajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) semester 2 tahun 2020 dengan realisasinya yang mencakup unsur - unsur pendapatan, belanja, selama periode semester 2 tahun 2020 (1 januari 2020 s/d 31 desember 2020).

Realisasi pendapatan pada semester 2 Tahun Anggaran 2020 berupa pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.583.880.055,00 atau mencapai 122,52 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp.476.544.000,00.

Realisasi Belanja pada semester 2 Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.15.997.097.759,00 atau mencapai 88,23 % dari anggarannya sebesar Rp.18.131.309.396,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	476.544.000,00	583.880.055,00	467.200.000,00	474.006.180,00
Belanja	18.131.309.396,00	15.997.097.759,00	43.328.670.547,00	38.795.064.454,00

## **2. Laporan Operasional**

**Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas.**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus / defisit dari operasi, surplus / defisit dari kegiatan non operasional. Pendapatan LO untuk sampai dengan 31 desember 2020 adalah Rp.583.880.055,00. Jumlah beban adalah sebesar Rp.18.348.216.887,00 sehingga terdapat defisit dari Laporan Operasional senilai (Rp.17.764.336.832,00).

### III. LAPORAN OPERASIONAL



#### DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER 2 TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019

NO. Urut	URAIAN	SALDO TAHUN 2020	SALDO TAHUN 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>8</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>583.880.055,00</b>	<b>474.006.180,00</b>	<b>109.873.875,00</b>	<b>23,18</b>
<b>8.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>583.880.055,00</b>	<b>474.006.180,00</b>	<b>109.873.875,00</b>	<b>23,18</b>
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	583.880.055,00	474.006.180,00	109.873.875,00	23,18
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>18.348.216.887,00</b>	<b>40.776.467.228,00</b>	<b>(22.428.250.341,00)</b>	<b>(55,00)</b>
9.1.1	Beban Pegawai - LO	13.493.810.374,00	13.361.550.889,00	132.259.485,00	0,99
9.1.2	Beban Persediaan	486.148.400,00	11.937.765.908,00	(11.451.617.508,00)	(95,93)
9.1.2	Beban Jasa	819.645.467,00	2.209.136.220,00	(1.389.490.753,00)	(62,90)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	213.002.554,00	323.773.605,00	(110.771.051,00)	(34,21)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	1.094.054.947,00	7.000.936.584,00	(5.906.881.637,00)	(84,37)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	3.507.372.000,00	(3.507.372.000,00)	(100,00)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	2.241.555.145,00	2.435.126.022,00	(193.570.877,00)	(7,95)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain - Lain	0,00	806.000,00	(806.000,00)	(100,00)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(17.764.336.832,00)</b>	<b>(40.302.461.048,00)</b>	<b>22.538.124.216,00</b>	<b>(55,92)</b>
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(17.764.336.832,00)</b>	<b>(40.302.461.048,00)</b>	<b>22.538.124.216,00</b>	<b>(55,92)</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	,0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(17.764.336.832,00)</b>	<b>(40.302.461.048,00)</b>	<b>22.538.124.216,00</b>	<b>(55,92)</b>

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah aset adalah sebesar Rp.33.144.627.309,11 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.16.996.881,00 , aset tetap sebesar Rp.31.050.950.428,11 dan aset lainnya sebesar Rp.2.076.680.000,00.

Sementara jumlah kewajiban dan ekuitas dana adalah sebesar Rp.33.144.627.309,11, yang terdiri dari kewajiban sebesar Rp.20.971.346,00 dan ekuitas sebesar Rp.33.123.655.963,11.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Aset</b>		
- Aset Lancar	16.996.881,00	138.005.489,00
- Aset Tetap	31.050.950.428,11	33.299.421.837,00
- Aset Lainnya	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
<b>Kewajiban Dan Ekuitas Dana</b>		
- Kewajiban	20.971.346,00	32.415.971,00
- Ekuitas	33.123.655.963,11	35.481.691.355,00

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas Awal adalah Rp.35.481.691.355,00 di tambah dengan surplus / defisit anggaran semester 2 tahun 2020 (Rp.17.764.336.832,00), terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar sebesar (Rp.6.916.263,89) sehingga Ekuitas Akhir untuk semester 2 tahun 2020 adalah sebesar Rp.33.123.655.963,11.

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



### DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER 2 TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>35.481.691.355,00</b>	<b>37.463.094.132,00</b>
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.764.336.832,00)	(40.302.461.048,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(6.916.263,89)	(3,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	15.413.217.704,00	38.321.058.274,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>33.123.655.963,11</b>	<b>35.481.691.355,00</b>

### 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos - pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA Perbandingan)

		<b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> <b>SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2020</b>			
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	476.544.000,00	583.880.055,00	(107.336.055,00)	122,52
1 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	476.544.000,00	583.880.055,00	(107.336.055,00)	122,52
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah				
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	476.544.000,00	583.880.055,00	(107.336.055,00)	122,52
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-	-
1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-	
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-	-	
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-	
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
1 2 2 2	Dana Penyesuaian	-	-	-	
1 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	-	-	-	
1 3 1	Pendapatan Hibah	-	-	-	
1 3 2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
1 3 3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>476.544.000,00</b>	<b>583.880.055,00</b>	<b>(107.336.055,00)</b>	<b>122,52</b>

<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>18.131.309.396,00</b>	<b>15.997.097.759,00</b>	<b>2.134.211.637,00</b>	<b>88,23</b>
<b>2 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.131.309.396,00</b>	<b>15.997.097.759,00</b>	<b>2.134.211.637,00</b>	<b>88,23</b>
2 1 1	BELANJA PEGAWAI	15.333.751.428,00	13.493.024.083,00	1.840.727.345,00	88,00
2 1 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.797.557.968,00	2.504.073.676,00	293.484.292,00	89,51
2 1 3	BELANJA BUNGA	-	-	-	-
2 1 4	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-
2 1 5	BELANJA HIBAH	-	-	-	-
2 1 6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-
2 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-
<b>2 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>0</b>
2 2 1	BELANJA TANAH	-	-	-	-
2 2 2	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-
2 2 3	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-
2 2 4	BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-
2 2 5	BELANJA ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
2 2 6	BELANJA ASET LAINNYA	-	-	-	-
<b>2 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2 3 1	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.131.309.396,00</b>	<b>15.997.097.759,00</b>	<b>2.134.211.637,00</b>	<b>88,23</b>
<b>2 4</b>	<b>TRANSFER</b>				
2 4 1	BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
2 4 2	BAGI HASIL RETRIBUSI KE KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
2 4 3	BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA KE KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>				
	<b>JUMLAH (BEL. OPERASI S.D. TRANSFER)</b>	<b>18.131.309.396,00</b>	<b>15.997.097.759,00</b>	<b>2.134.211.637,00</b>	<b>88,23</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(17.654.765.396,00)</b>	<b>(15.413.217.704,00)</b>	<b>(2.241.547.692,00)</b>	<b>87,30</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3 1 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-

		Dipisahkan				
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
.	.	.				
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
.	.	.				
3	1	6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
.	.	.				
			<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
.	.					
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
.	.					
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
.	.					
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
.	.					
3	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
.	.					
			<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-
			<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>(17.654.765.396,00)</b>	<b>(15.413.217.704,00)</b>	<b>(2.241.547.692,00)</b>
.	.					<b>87,30</b>

# NERACA



## NERACA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	16.996.881,00	25.145.489,00
Persediaan	0,00	112.860.000,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>16.996.881,00</b>	<b>138.005.489,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	12.176.336.000,00	12.176.336.000,00
Peralatan dan Mesin	12.951.765.492,11	12.920.265.492,11
Gedung dan Bangunan	20.030.826.086,00	20.062.326.086,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.212.842.854,00	1.212.842.854,00
Aset Tetap Lainnya	189.441.000,00	189.441.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(15.510.261.004,00)	(13.261.789.595,11)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>31.050.950.428,11</b>	<b>33.299.421.837,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
Tagihan TGR	0,00	0,00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.076.680.000,00</b>	<b>2.076.680.000,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33.144.627.309,11</b>	<b>35.514.107.326,00</b>

<b>URAIAN</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	20.971.346,00	32.415.971,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>20.971.346,00</b>	<b>32.415.971,00</b>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>20.971.346,00</b>	<b>32.415.971,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	33.123.655.963,11	35.481.691.355,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>33.144.627.309,11</b>	<b>35.514.107.326,00</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos - pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama - sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan.

Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil - hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan SKPD semester 2 Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

### **I.3. SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematisasi Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

#### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

#### **BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing - masing pos – pos Pelaporan Keuangan
  - 5.1.1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah
- 5.1.2 Belanja
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Modal
- 5.1.3 Aset
  - a. Aset Lancar
  - b. Aset Tetap
  - c. Aset Lain-lain
- 5.1.4 Kewajiban
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
- 5.1.5 Ekuitas Dana
  - a. Ekuitas Dana Lancar
  - b. Ekuitas Dana Investasi

## **BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN**

## **BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. EKONOMI MAKRO**

##### **A.1. Kedudukan**

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

##### **A.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 yang menegaskan bahwa tugas pokok Dinas Perkebunan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dasar dan kebijakan di bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan.
3. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah.
4. Melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah.
5. Pembinaan pemanfaatan kebun.
6. Pengawasan hasil perkebunan

7. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan
8. Pembinaan usaha perkebunan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan rencana dan program bidang perkebunan.
3. Perencanaan, pengembangan dan penggalian bibit unggul perkebunan.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan.
5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan perkebunan.
6. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis perkebunan.
7. Pelaksanaan pembinaan promosi dan pemasaran hasil perkebunan.
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Perkebunan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### **A.3. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh**

1. Jaringan institusi / aparatur perkebunan mendapat atau memegang mandat / tupoksi menyelenggarakan pembinaan pembangunan perkebunan dimana tuntutan / tantangan pembinaan pembangunan perkebunan ke depan semakin meningkat dan kompleks.
2. Sub sektor perkebunan memiliki kontribusi dan peranan besar sebagai penghasil devisa negara, penyediaan lapangan kerja serta memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial budidaya masyarakat di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mengembangkan potensi perkebunan daerah dan menetapkan pembangunan sub sektor perkebunan pada prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

## **A.4. Perencanaan Strategis**

### **a. Visi dan Misi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang ada, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi juga tuntutan pembangunan ke depan, maka visi pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah ditetapkan sesuai dengan visi pemerintah daerah yaitu : **“ Perkebunan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil ”**.

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan perkebunan yang didasarkan pada sumber daya alam tersedia di Kalimantan Tengah adalah :**“ Mewujudkan perkebunan yang berorientasi agribisnis untuk mengembangkan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan”**.

### **b. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan perkebunan maka ditetapkan tujuan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.
4. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dan sub sektor perkebunan.
5. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja.
6. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri.
7. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan pengembangan wilayah.

Mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan perkebunan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan produktivitas perkebunan hingga mencapai 75 %

dari potensi produksi dilapangan.

2. Meningkatnya jumlah SDM perkebunan yang berkualitas sebanyak 15 %.
3. Meningkatkan pendapatan petani yang usaha pokoknya perkebunan, sehingga mencapai rata-rata US\$ 1.500-200 / KK (kepemilikan 2 ha / kk) yang diikuti dengan peningkatan kualitas hidup petani dan masyarakat disekitar perkebunan.
4. Meningkatkan penerimaan devisa ekspor komoditas perkebunan menjadi sebesar US\$ 30 juta / tahun.
5. Meningkatnya kemampuan untuk menyerap tenaga kerja perkebunan dengan penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 15.000 tenaga kerja / tahun.
6. Meningkatkan pertumbuhan PDRB perkebunan diproyeksikan sebesar 6,2 % sebagai hasil upaya peningkatan produktivitas pengembangan baru.
7. Menumbuhkan 13 sentra - sentra wilayah pengembangan perkebunan.

Di bidang Perkebunan sampai akhir tahun 2020, jenis tanaman perkebunan berupa : Karet, Kelapa, Cengkeh, Kopi, Lada, Kakao, Jambu Mete dan Kelapa Sawit merupakan tanaman Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Swasta, dan Perkebunan Rakyat.

Untuk memperjelas bagaimana gambaran di bidang perkebunan di Kalimantan Tengah berdasarkan luas areal tanaman dan produksi tanaman, data tersebut disajikan dalam Tabel I :

Tabel I.1

**Luas Areal Tanaman Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Swasta,  
Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Tanaman (Ha)  
Tahun 2020**

No	Kabupaten / Kota	Karet	Kelapa	Cengkeh	Kopi	Lada	Kakao	Jambu Mete	Kelapa Sawit
1	Kobar	16.620	1.161	-	209	997	3	76	196.409
2	Kotim	46.590	31.163	-	662	39	-	8	409.775
3	Kapuas	30.561	11.248	-	655	-	-	-	54.758
4	Barsel	31.564	488	-	76	4	198	1	870
5	Barut	54.619	1.111	2	384	20	514	13	27.864

6	Sukamara	7.211	1.172	-	183	487	2	444	55.689
7	Lamandau	7.032	436	-	303	547	-	-	79.153
8	Seruyan	18.072	5.991	-	168	214	-	653	317.055
9	Katingan	20.948	3.557	-	365	-	-	-	58.581
10	Pulang Pisau	73.656	16.433	-	735	-	-	-	12.000
11	Gunung Mas	69.411	732	-	-	-	-	-	20.610
12	Bartim	52.556	408	-	81	2	91	-	11.434
13	Murung Raya	52.485	1.089	4	611	55	2	11	3
14	Palangka Raya	4.391	194	-	2	-	-	22	168
<b>JUMLAH 2020</b>		<b>485.715</b>	<b>75.183</b>	<b>6</b>	<b>4.434</b>	<b>2.365</b>	<b>810</b>	<b>1.228</b>	<b>1.244.537</b>
<b>2019</b>		<b>491.949</b>	<b>85.577</b>	<b>37</b>	<b>7.267</b>	<b>4.336</b>	<b>1.105</b>	<b>1.294</b>	<b>1.087.950</b>
<b>2018</b>		<b>418.708</b>	<b>85.278</b>	<b>38</b>	<b>7.273</b>	<b>4.102</b>	<b>929</b>	<b>1.294</b>	<b>909.703</b>
<b>2017</b>		<b>415.203</b>	<b>88.729</b>	<b>129</b>	<b>8.121</b>	<b>7.927</b>	<b>985</b>	<b>1.437</b>	<b>712.026</b>
<b>2016</b>		<b>406.230</b>	<b>89.072</b>	<b>129</b>	<b>8.290</b>	<b>8.230</b>	<b>976</b>	<b>1.371</b>	<b>610.589</b>

**Tabel I.2**

**Produksi Tanaman Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Swasta,  
Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Tanaman (Ton)  
Tahun 2020**

No.	Kabupaten/ Kota	Karet	Kelapa	Cengkeh	Kopi	Lada	Kakao	Jambu Mete	Kelapa Sawit
1	Kobar	5.309	320	-	17	424	-	3	934.262
2	Kotim	31.321	34.942	-	268	10	-	-	917.496
3	Kapuas	16.536	10.864	-	58	-	-	-	1.077
4	Barsel	21.950	353	-	15	1	79	-	344
5	Barut	38.080	259	-	150	5	151	-	91.436
6	Sukamara	2.880	951	-	36	36	-	7	74.291
7	Lamandau	1.812	200	-	94	351	-	-	80.680
8	Seruyan	8.692	3.213	-	42	33	-	22	232.365
9	Katingan	5.632	1.711	-	101	-	-	-	33.825
10	Pulang Pisau	15.322	17.043	-	244	-	-	-	-
11	Gunung Mas	45.724	133	-	-	-	-	-	4.398
12	Bartim	29.810	279	-	33	1	28	-	861
13	Murung Raya	32.322	520	-	327	18	-	2	1
14	Palangka Rava	803	60	-	-	-	-	4	4
<b>JUMLAH 2020</b>		<b>256.193</b>	<b>70.848</b>	<b>-</b>	<b>1.385</b>	<b>879</b>	<b>258</b>	<b>38</b>	<b>2.370.040</b>
<b>2019</b>		<b>229.861</b>	<b>70.022</b>	<b>-</b>	<b>1.940</b>	<b>1.725</b>	<b>273</b>	<b>48</b>	<b>1.630.091</b>
<b>2018</b>		<b>250.313</b>	<b>80.613</b>	<b>1</b>	<b>2.166</b>	<b>1.919</b>	<b>308</b>	<b>49</b>	<b>1.449.987</b>
<b>2017</b>		<b>257.689</b>	<b>87.555</b>	<b>5</b>	<b>2.933</b>	<b>2.925</b>	<b>318</b>	<b>52</b>	<b>6.434.970</b>
<b>2016</b>		<b>231.255</b>	<b>80.449</b>	<b>5</b>	<b>2.861</b>	<b>2.991</b>	<b>343</b>	<b>42</b>	<b>6.453.272</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota.

## **Penanaman Modal dan Perbankan**

Penanaman modal dalam negeri yang disetujui pemerintah menurut sektor ekonomi membaik. Tahun 2015 sampai dengan 2016 penanaman modal yang disetujui pemerintah 25,55 milyar rupiah naik menjadi 33,05 milyar rupiah. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 naik menjadi 59,88 milyar rupiah. Tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 56,66 %. Sedangkan penanaman modal asing yang disetujui pemerintah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 1,77 milyar rupiah tahun 2016 menjadi 5,19 milyar rupiah tahun 2017, tahun 2018 menjadi 8,08 milyar rupiah, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,19 milyar rupiah. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan 6,45 %.

Jumlah bank di Kalimantan Tengah tahun 2016 tercatat 116 kantor unit bank yang tersebar di beberapa daerah kabupaten / kota, tahun 2017 bertambah menjadi 142 kantor unit, dan tahun 2018 berkurang menjadi 39 kantor unit. Tahun 2019 bertambah menjadi 43 kantor unit, tahun 2020 bertambah lagi menjadi 167 kantor unit.

Dana perbankan (giro) yang tersedia di Kalimantan Tengah Desember 2019 sebesar 1.774.508 milyar rupiah. Sedangkan Desember 2020 sebesar 2.886.265 milyar rupiah yang semuanya tersedia pada bank pemerintah.

## **Angka Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keadaan perekonomian suatu daerah. Tinggi rendahnya inflasi menunjukkan tingkat stabilitas ekonomi suatu daerah. Inflasi Kalimantan Tengah diwakili oleh Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.

Pada tahun 2016 inflasi Kota Palangka Raya mengalami kenaikan menjadi 7,96 % , sedangkan Kota Sampit mengalami penurunan menjadi 7,57 %. Tahun 2017 kota Palangka Raya dan Kota Sampit mengalami inflasi masing - masing 11,65 % dan 8,89 % dan inflasi Kota Sampit lebih rendah jika dibandingkan angka dari inflasi nasional sebesar 11,06 %. Tahun 2018 kota Palangka Raya dan Kota Sampit mengalami inflasi masing-masing 1,39 % dan 2,85 % dan Tahun 2019 inflasi di Palangka Raya mengalami kenaikan sebesar 9,49 % sedangkan di Sampit sebesar 9,53 % lebih besar dari inflasi nasional per juli tahun 2019 kota sebesar 6,96 %. Pada tahun 2020, inflasi di Palangka Raya mengalami penurunan sebesar 5,28 %, sedangkan Sampit juga

mengalami penurunan sebesar 3,60 %.

## **KEBIJAKAN KEUANGAN**

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekuen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati / Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan - tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk akhir tahun 2020 yaitu :

- a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi.
- b. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
- c. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Pedesaan.
- d. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- g. Penanganan Bencana, Penanggulangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.
- h. Pelestarian Lingkungan Hidup.
- i. Percepatan Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya.

Kesembilan prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan perkiraan yang dicapai dalam tahun 2020, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2020, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2020 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

### **2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja / perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan APBD selama setahun.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan merupakan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) pada program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang dibuat dalam bentuk Laporan Perkembangan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan yang dilaporkan tiap bulannya. Sehingga dapat diketahui prosentase dari pencapaian rencana tingkat capaian target kinerja keuangan.

#### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Dalam pencapaian target kinerja keuangan tentu saja banyak hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pencapaian target kinerja keuangan adalah terlambatnya kegiatan penyaluran ke lokasi yang terkendala musim, terlambat dilaksanakannya kegiatan oleh masing - masing bidang yang belum sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Untuk faktor lainnya yang menjadi hambatan atau kendala adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ilmu di Bidang Akuntansi / Keuangan.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat - pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

**a. Basis akuntansi (*accounting basis*);**

1. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas dana.
2. **Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
3. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas

Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba / rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih / kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

4. **Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**b. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);**

1. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

**c. Prinsip realisasi (*realization principle*);**

1. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
2. Prinsip layak temu biaya - pendapatan (*matching - cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

**d. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);**

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

**e. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);**

1. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode - periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
2. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

**f. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);**

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

**g. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);**

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

**h. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).**

1. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

#### **4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

##### **1. Periode Akuntansi**

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

##### **2. Pos-Pos Neraca**

Kebijakan pos - pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana

##### **A. ASET**

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi / sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber - sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

##### **1) ASET LANCAR**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

### **1.1. Kas di Kas Daerah**

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank - bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### **1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

## **2) PIUTANG**

2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

- 2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
- Klarifikasi piutang menurut umur
  - Klarifikasi piutang menurut debitur

### **3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL**

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat - alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
- Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
  - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal - hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian / klarifikasi barang dan jumlah masing - masing klarifikasi.

### **4) INVESTASI JANGKA PANJANG**

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
  - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan / atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual / ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

## **5) ASET TETAP**

- 5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- 5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

### 5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :

- Tanah
- Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air (irigasi)
- Instalasi
- Jaringan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
- Alat - Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat - Alat Kedokteran
- Alat - Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

### 5.4 Penjelasan Akun Aset Tetap

#### a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain - lain sejenisnya.

#### b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain - lain sejenisnya.

#### c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain - lain sejenisnya.

#### d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain - lain sejenisnya.

- e. Jaringan  
Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain - lain sejenisnya.
- f. Bangunan Gedung  
Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain - lain sejenisnya.
- g. Bangunan Monumen  
Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain - lain sejenisnya.
- h. Alat - alat Besar  
Alat - alat Besar meliputi alat - alat besar darat, alat - alat besar apung, alat - alat bantu dan lain - lain sejenisnya.
- i. Alat - alat Angkutan  
Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain - lain sejenisnya.
- j. Alat Bengkel dan Alat Ukur  
Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain - lain sejenisnya.
- k. Alat Pertanian  
Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan / panen penyimpan dan lain - lain sejenisnya.
- l. Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga  
Alat - alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain - lain sejenisnya.
- m. Alat Studio dan Alat Komunikasi  
Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain - lain sejenisnya.
- n. Alat - alat Kedokteran  
Alat - alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain - lain sejenisnya.

- o. Alat - alat Laboratorium  
Alat - alat laboratorium meliputi unit - unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain - lain sejenisnya.
- p. Buku dan Perpustakaan  
Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang - barang perpustakaan dan lain - lain sejenisnya.
- q. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan  
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain - lain sejenisnya.
- r. Hewan / Ternak dan Tumbuhan  
Hewan / Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain - lain sejenisnya.
- s. Alat Keamanan  
Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain - lain sejenisnya.

#### **5.4.1 Pengakuan**

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal - hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi

dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

#### **5.4.2 Pengukuran**

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai

dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya - biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya - biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat - alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat - alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat - alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi

dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat - alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat - alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian / kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Hewan / ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

### **5.4.3 Penilaian**

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

### **5.4.4 Pengungkapan**

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

## **6) DANA CADANGAN**

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

## **7) ASET LAIN-LAIN**

Aset lain - lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain - lain terdiri dari :

7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang / kekayaan milik negara / daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal - hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

**Lain - Lain Aktiva** adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

## **B. KEWAJIBAN**

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi

keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

## 1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :
  - 1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
  - 2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee / Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
  - 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
- b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.
- d. Kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2006.

## 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali / jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebankan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan.
- f. **Utang Lain - lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis - jenis rekening utang.

## **B. EKUITAS DANA**

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana

## Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

### a. **Ekuitas Dana Lancar**

- Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas :

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah** perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran ini. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.
5. **Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah** kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
6. **Diinvestasikan dalam bentuk aset daerah yang dipisahkan adalah** kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

#### **b. Ekuitas Dana Investasi**

- Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

#### **c. Ekuitas Dana Cadangan**

- Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.
- Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicapangkan diantaranya :
  - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
  - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

#### **4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun - akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos - pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus

memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD kepada para pemakai / stakeholders.

## BAB V

### PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING - MASING POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD SKPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

##### 5.1.1. PENDAPATAN

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp.583.880.055,00**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perkebunan Provinsi berasal dari Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 mencapai sebesar Rp.583.880.055,00 atau 122,52 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.476.544.000,00. Tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah semester 2 Tahun Anggaran 2020 ini pada dasarnya dikarenakan target yang ditetapkan sesuai potensi yang ada.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Pendapatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	476.544.000,00	583.880.055,00	122,52	474.006.180,00
	<b>Jumlah</b>	<b>476.544.000,00</b>	<b>583.880.055,00</b>	<b>122,52</b>	<b>474.006.180,00</b>

Realisasi PAD pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan berjumlah Rp.583.880.055,00 atau 122,52 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.476.544.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pendapatan dalam APBD, maka terdapat kenaikan kontribusi PAD pada tahun 2020 ini. Secara garis besar gambaran realisasi PAD tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Realisasi PAD Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	476.544.000,00	583.880.055,00	122,52	474.006.180,000
2	Lain – Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>476.544.000,00</b>	<b>583.880.055,00</b>	<b>122,52</b>	<b>474.006.180,00</b>

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pada semester 2 tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Retribusi Daerah Rp.583.880.055,00**

Realisasi penerimaan retribusi daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan semester 2 tahun 2020 sebesar Rp.583.880.055,00 atau 122,52 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.476.544.000,00 sehingga pada Laporan Keuangan ini realisasi penerimaannya berhasil melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Rincian realisasi penerimaan retribusi daerah pada LRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah semester 2 tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Retribusi Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	30.600.000,00	44.500.000,00		44.900.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.220.000,00	2.000.000,00		5.200.000,00
3	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	1.020.000,00	0,00		0,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	433.704.000,00	537.380.055,00		423.906.180,00
<b>Jumlah</b>		<b>476.544.000,00</b>	<b>583.880.055,00</b>	<b>122,52</b>	<b>474.006.180,0</b>

**b. Lain – Lain PAD Yang Sah**

**Rp.0,00**

Realisasi Lain – Lain PAD Yang Sah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan semester 2 tahun 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.0,00 sehingga pada Laporan Keuangan ini realisasi penerimaannya sudah berhasil melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Rincian Lain – Lain PAD Yang Sah pada LRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah semester 2 tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

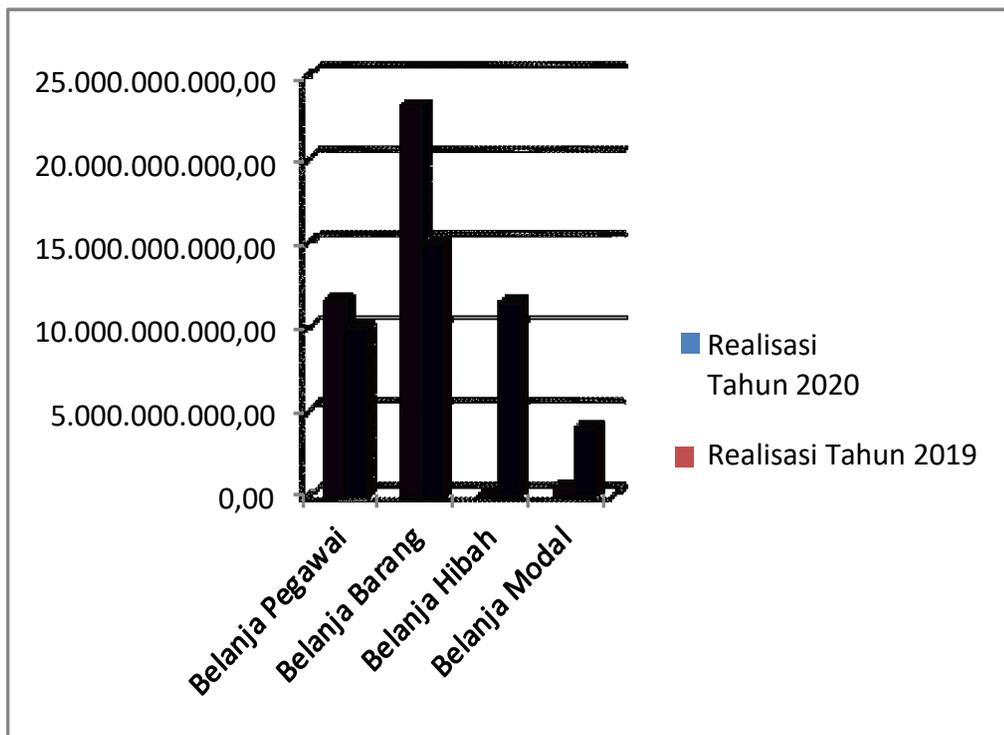
**Tabel 4.4**  
**Realisasi Lain – Lain PAD Yang Sah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.2. BELANJA

Komposisi realisasi belanja operasi dapat disajikan seperti grafik di bawah ini :

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019
Belanja Pegawai	13.493.024.083,00	13.362.167.197,00
Belanja Barang Jasa	2.504.073.676,00	21.282.237.457,00
Belanja Hibah	0,00	3.507.372.000,00
Belanja Modal	0,00	643.287.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.997.097.759,00</b>	<b>38.795.064.454,00</b>



**A. Belanja Operasi terdiri atas :**

**a. Belanja Pegawai Rp.13.493.024.083,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.15.333.751.428,00 atau 84,57 % dari total anggaran belanja SKPD. Sampai dengan semester 2 tahun anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.13.493.024.083,00 atau 88,00 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.840.727.345,00 atau 12 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.13.362.167.197,00.

**Tabel 4.5**  
**Realisasi Belanja Pegawai Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/ Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.324.198.817	5.716.902.221	93,26	5.897.914.829	-3,07
- Tunjangan Keluarga	636.702.469	451.408.000	70,39	448.150.458	0,73
- Tunjangan Jabatan	335.933.500	284.265.000	87,99	295.600.000	-3,83
- Tunjangan Fungsional	103.320.000	49.250.000	47,79	49.380.000	-0,26
- Tunjangan Fungsional Umum	236.990.250	205.010.000	93,41	221.375.000	-7,39
- Tunjangan Beras	277.918.992	259.336.020	94,23	261.870.720	-0,97
- Tunjangan PPh/Khusus	97.131.400	19.339.828	22,72	22.063.452	-12,34
- Pembulatan Gaji	500.000	73.014	17,05	85.238	-14,34
- Iuran Asuransi Kesehatan	0	0	0	0	100,00
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0	0	0	0	100,00
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	0	0	0	0	100,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja	4.172.800.000	3.714.400.000	79,75	3.327.800.000	11,62
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0	0	0	30.000.000	-100,00
- Tambahan Penghasilan Uang Makan	1.525.000.000	1.264.600.000	77,23	1.177.767.500	7,37
- Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.016.000	0	0	0	100,00

-	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000	12.000.000	100,00	104.100.000	-88,47
-	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0	0	0	136.770.000	-100,00
-	Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0	0	0	23.000.000	-100,00
-	Belanja Honorarium PNS Lainnya	0	0	0	0	100,00
-	Belanja Honorarium Pengelola Uang Dan Barang	312.040.000	301.440.000	96,60	309.690.000	-2,66
-	Moderator	0	0	0	2.400.000	-100,00
-	Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0	0	0	28.600.000	-100,00
-	Belanja Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	1.285.200.000	1.215.000.000	94,54	1.025.600.000	18,47
<b>Jumlah</b>		<b>15.333.751.428</b>	<b>13.493.024.083</b>	<b>88,00</b>	<b>13.362.167.197</b>	<b>0,98</b>

**b. Belanja Barang dan Jasa****Rp.2.504.073.676,00**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.2.797.557.968,00 atau 15,42 % dari total anggaran belanja SKPD. Sampai dengan semester 2 tahun anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.2.504.073.676,00 atau 89,51 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.293.484.292,00 atau 10,49 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.21.282.237.457,00.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
<b>Belanja Langsung</b>					
- Belanja Bahan Pakai Habis	182.206.800	179.753.800	98,65	683.363.400	-73,70
- Belanja Bahan/Material	450.000	450.000	100,00	10.141.817.500	-100,00
- Belanja Jasa Kantor	881.125.971	665.334.627	75,51	1.655.126.789	-59,80
- Belanja Premi Asuransi	161.945.000	156.393.148	96,57	133.376.779	17,26
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	259.139.400	213.002.554	82,20	323.773.605	-34,21
- Belanja Cetak Dan Penggandaan	135.417.797	134.034.600	98,98	523.677.800	-74,41
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000	2.000.000	100,00	242.700.000	-99,18
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	8.000.000	-100,00
- Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0,00
- Belanja Makanan Dan Minuman	62.675.000	59.050.000	94,22	235.790.000	-74,96
- Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	0	0	0	0	0,00
- Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	0	0	0	118.550.000	-100,00
- Belanja Perjalanan Dinas	1.112.598.000	1.094.054.947	98,33	7.000.936.584	-84,37
- Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	75.625.000	-100,00
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	139.500.000	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.797.557.968</b>	<b>2.504.073.676</b>	<b>89,51</b>	<b>21.282.237.457</b>	<b>-88,23</b>

**c. Belanja Hibah****Rp.0,00**

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total anggaran belanja SKPD. Sampai dengan semester 2 tahun anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.3.507.372.000,00.

Rincian realisasi Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	-	0,00	3.507.372.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.372.000,00</b>	<b>-100,00</b>

**1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (5.2.2.01)****Rp.179.753.800,00**

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar Rp.182.206.800,00 atau 6,51 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.179.753.800,00 atau 98,65 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.453.000,00 atau 1,35 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Kantor sebesar 73,70 %. Rincian realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Alat Tulis Kantor	134.241.800,00	133.479.900,00	99,43	406.637.000,00	-67,17
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.685.000,00	4.685.000,00	100,00	19.350.000,00	-75,79
- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	5.520.000,00	5.475.000,00	99,18	4.455.000,00	22,90
- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.260.000,00	27.043.900,00	99,21	44.269.400,00	-38,91
- Belanja BBM / Gas	0,00	0,00	0	0,00	0
- Belanja Dokumentasi	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	12.430.000,00	-82,30
- Belanja Bahan Dekorasi	8.300.000,00	6.870.000,00	82,77	143.975.000,00	-95,23
- Belanja Baliho	0,00	0,00	0	29.472.000,00	-100,00
- Belanja Bahan Perlombaan	0,00	0,00	0	9.000.000,00	-100,00
- Belanja Bahan Praktik Keterampilan	0,00	0,00	0	0,00	100,00
- Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	0,00	0,00	0	0,00	100,00
- Belanja Bahan Diklat	0,00	0,00	0	13.775.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>182.206.800,00</b>	<b>179.753.800,00</b>	<b>98,65</b>	<b>683.363.400,00</b>	<b>-73,70</b>

**2. Belanja Bahan / Material (5.2.2.02)****Rp.450.000,00**

Belanja Bahan / Material dianggarkan sebesar Rp.450.000,00 atau 0,016 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.450.000,00 atau 100 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Bahan / Material sebesar 100 %. Rincian realisasi Belanja Bahan / Material dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Bahan Baku Bangunan	450.000,00	450.000,00	100,00	1.452.000,00	-69,01
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0	7.460.120.000,00	-100,00
- Belanja Bahan Obat - Obatan	0,00	0,00	0	0,00	0
- Belanja Bahan Kimia	0,00	0,00	0	2.680.245.500,00	-100,00
- Belanja Bahan Perlengkapan Laboratorium	0,00	0,00	0	0,00	100,00
- Belanja Bahan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.141.817.500,00</b>	<b>-100,00</b>

**3. Belanja Jasa Kantor (5.2.2.03)****Rp.665.334.627,00**

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp.881.125.971,00 atau 31,49 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.665.334.627,00 atau 75,51 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.215.791.344,00 atau 24,49 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar 59,80 %. Rincian realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Telepon	107.121.187,00	93.073.014,00	86,89	98.580.749,00	-5,59
- Belanja Air	36.726.400,00	20.814.000,00	56,67	23.702.200,00	-12,19
- Belanja Listrik	305.138.384,00	199.199.813,00	65,28	245.619.690,00	-18,90
- Belanja Surat Kabar/Majalah	47.560.000,00	13.200.000,00	27,75	21.800.000,00	-39,45
- Belanja Kawat / Faksimili / Internet	36.000.000,00	2.754.800,00	7,65	2.630.400,00	4,73
- Belanja Paket / Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	30.780.000,00	28.493.000,00	92,57	35.175.000,00	-19,00
- Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	91.800.000,00	-75,16
- Belanja Uang Hadiah Lomba / Prestasi Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	0,00	0	7.500.000,00	-100,00
- Belanja Jasa Pihak Ketiga	295.000.000,00	285.000.000,00	96,61	1.128.318.750,00	-74,74
<b>Jumlah</b>	<b>881.125.971,00</b>	<b>665.334.627,00</b>	<b>75,51</b>	<b>1.655.126.789,00</b>	<b>-59,80</b>

#### 4. Belanja Premi Asuransi (5.2.2.04)

**Rp.156.393.148,00**

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp.161.945.000,00 atau 5,78 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.156.393.148,00 atau 96,57 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.551.852,00 atau 3,43 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat adanya kenaikan realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar 17,26 %. Rincian realisasi Belanja Premi Asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan	59.945.000,00	54.411.864,00	90,77	31.988.955,00	70,10
- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	102.000.000,00	101.981.284,00	99,98	101.387.824,00	0,59
<b>Jumlah</b>	<b>161.945.000,00</b>	<b>156.393.148,00</b>	<b>96,57</b>	<b>133.376.779,00</b>	<b>17,26</b>

**5. B. Perawatan Kendaraan Bermotor (5.2.2.05) Rp.213.002.554,00**

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.259.139.400,00 atau 9,26 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.213.002.554,00 atau 82,20 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.46.136.846,00 atau 17,80 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar 34,21 %. Rincian realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Jasa Service	57.800.000,00	48.418.306,00	83,77	80.108.153,00	-39,56
-	Belanja Penggantian Suku Cadang	90.000.000,00	72.653.400,00	80,73	32.017.552,00	126,92
-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	75.089.400,00	71.056.648,00	94,63	194.562.000,00	-63,48
-	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	36.250.000,00	20.874.200,00	57,58	17.085.900,00	22,17
<b>Jumlah</b>		<b>259.139.400,00</b>	<b>213.002.554,00</b>	<b>82,20</b>	<b>323.773.605,00</b>	<b>-34,21</b>

**6. Belanja Cetak dan Penggandaan (5.2.2.06) Rp.134.034.600,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.135.417.797,00 atau 4,84 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.134.034.600,00 atau 98,98 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.383.197,00 atau 1,02 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Cetak Dan Penggandaan sebesar 74,41 %. Rincian realisasi Belanja Cetak Dan Penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Cetak	13.876.000,00	13.755.000,00	99,15	101.250.000,00	-86,41
-	Belanja Penggandaan	103.601.000,00	103.379.600,00	93,77	368.062.800,00	-71,91
-	Belanja Penjilidan	17.940.797,00	16.900.000,00	93,80	54.365.000,00	-68,91
<b>Jumlah</b>		<b>135.417.797,00</b>	<b>134.034.600,00</b>	<b>98,98</b>	<b>523.677.800,00</b>	<b>-74,41</b>

**7. B. Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir (5.2.2.07). Rp.2.000.000,00**

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir dianggarkan sebesar Rp.2.000.000,00 atau 0,07 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasikan sebesar Rp.2.000.000,00 atau 100 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir sebesar 99,18 %. Rincian realisasi Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	175.700.000,00	-98,86
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0	67.000.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>242.700.000,00</b>	<b>-99,18</b>

**8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas (5.2.2.8). Rp.0,00**

Belanja Sewa Sarana Mobilitas dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar 100 %. Rincian realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0	8.000.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>

**9. Belanja Makanan Dan Minuman (5.2.2.11). Rp.59.050.000,00**

Belanja Makanan Dan Minuman dianggarkan sebesar Rp.62.675.000,00 atau 2,24 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.59.050.000,00 atau 94,22 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.625.000,00 atau 5,78 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Makanan Dan Minuman sebesar 74,96 %. Rincian realisasi Belanja Makanan Dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0	9.460.000,00	-100,00
-	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.675.000,00	59.050.000,00	94,22	153.310.000,00	-61,48
-	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan	0,00	0,00	0	73.020.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>		<b>62.675.000,00</b>	<b>59.050.000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>235.790.000,00</b>	<b>-74,96</b>

**10. Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya (5.2.2.12). Rp.0,00**

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan tahun 2019 tidak ada terdapat kenaikan atau penurunan realisasi Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya sebesar 0 %. Rincian realisasi Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu (5.2.2.14). Rp.0,00**

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu sebesar 100 %. Rincian realisasi Belanja Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0	118.550.000,00	-100
- Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.550.000,00</b>	<b>-100</b>

**12. Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15). Rp.1.094.054.947,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp.1.112.598.000,00 atau 39,77 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.1.094.054.947,00 atau 98,33 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.18.543.053,00 atau 1,67 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 84,37 %. Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	842.437.000,00	838.413.000,00	99,52	4.925.021.560,00	-82,98
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.161.000,00	255.641.947,00	94,63	2.075.915.024,00	-87,69
<b>Jumlah</b>	<b>1.112.598.000,00</b>	<b>1.094.054.947,00</b>	<b>98,33</b>	<b>7.000.936.584,00</b>	<b>-84,37</b>

**13. Belanja Jasa Konsultansi (5.2.2.19)****Rp.0,00**

Belanja Jasa Konsultansi dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Jasa Konsultansi sebesar 100 %. Rincian realisasi Belanja Jasa Konsultansi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0	42.950.000,00	-100,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0	32.675.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.950.000,00</b>	<b>-100,00</b>

**14. B. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS (5.2.2.23). Rp.0,00**

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS sebesar 100 %. Rincian realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	0,00	0	139.500.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>139.500.000,00</b>	<b>-100,00</b>

**B. Belanja Modal****Rp.0,00**

Kelompok Belanja modal dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total anggaran belanja SKPD. Sampai dengan semester 2 tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total belanja modal sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.643.287.800,00.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Dinas Perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0	0,00	0
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	0,00	0,00	0	167.557.800,00	-100
- Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0	274.680.000,00	-100
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	0,00	0,00	0	201.050.000,00	0
- Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>643.287.800,00</b>	<b>-100,00</b>

## 1. Belanja Modal Tanah

**Rp.0,00**

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total Belanja Modal Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.0,00. Dengan demikian tidak ada terdapat kenaikan atau penurunan realisasi Belanja Modal Tanah jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Tanah Dinas Perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran	Realisasi	%		
- B. M. Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

**Rp.0,00**

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total Belanja Modal Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.167.557.800,00. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar 100 % jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dinas Perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0	0,00	0
- B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0	0,00	100,00
- B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu	0,00	0,00	0	0,00	0

-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	0,00	0,00	0	2.420.000,00	-100,00
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B.M.Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0	50.187.800,00	-100,00
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0	76.175.000,00	-100,00
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video Dan Film	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0	38.775.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.557.800,00</b>	<b>-100,00</b>

### 3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

**Rp.0,00**

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total Belanja Modal Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.274.680.000,00. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar 100 % jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Dinas Perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0	274.680.000,00	-100,00
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>274.680.000,00</b>	<b>-100,00</b>

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Rp.0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total Belanja Modal Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.201.050.000,00. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar 100 % jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dinas Perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	B. M Jalan, Irigasi Dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M Jalan, Irigasi Dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M Jalan, Irigasi Dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M Jalan, Irigasi Dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0	201.050.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.050.000,00</b>	<b>-100,00</b>

**5. Belanja Aset Tetap Lainnya****Rp.0,00**

Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari total Belanja Modal Dinas Perkebunan. Sampai dengan semester 2 Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.0,00. Dengan demikian tidak ada terdapat adanya kenaikan atau penurunan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya jika dibandingkan dengan tahun 2019. Perbandingan rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Dinas Perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran	Realisasi	%		
- B. M Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap****Rp.15.510.261.004,00**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.15.510.261.004,00 dan Rp.13.261.789.595,11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan terlampir pada Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap :

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 12.176.336.000,00	Rp -	Rp 12.176.336.000,00
2	Peralatan Dan Mesin	Rp 12.951.765.492,11	Rp 10.303.124.837,00	Rp 2.648.640.655,11
3	Gedung Dan Bangunan	Rp 20.030.826.086,00	Rp 4.905.898.576,00	Rp 15.124.927.510,00
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp 1.212.842.854,00	Rp 301.237.591,00	Rp 911.605.263,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 189.441.000,00	Rp -	Rp 189.441.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 46.561.211.432,11</b>	<b>Rp 15.510.261.004,00</b>	<b>Rp 31.050.950.428,11</b>

### 5.1.3. Aset

Aset terdiri atas :

#### a. ASET LANCAR

##### 1. Kas Bendahara Penerimaan **Rp.0,00**

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020  
Rp.0,00

##### Kas Bendahara Pengeluaran **Rp.0,00**

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020  
Rp.0,00

##### 2. Piutang Lain-lain **Rp.0,00**

##### 3. Beban Dibayar Di Muka **Rp.16.996.881,00**

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.16.996.881,00**. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang / jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Dalam hal ini adalah pembayaran premi asuransi.

Rincian pembayaran premi asuransi atau Beban Dibayar di Muka yang berjumlah sebesar **Rp.16.996.881,00, (beban tahun 2021)** yang terdapat di Neraca 2020 yaitu sebagai berikut :

##### 1.) **Rp.3.237.126,00**

Adalah polis asuransi gedung kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan Jenderal Soedirman no. 18, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

##### 2.) **Rp.2.522.430,00**

Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BP3B, Jalan Cilik Riwut km. 7, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

##### 3.) **Rp.2.259.113,00**

Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BBKPP Pundu, Kab. Kotim, Kalimantan Tengah.

- 4.) Rp.944.720,00**  
Adalah Polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Kijang Innova, KH 43.
- 5.) Rp.828.760,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Chevrolet Colorado Double Cabin, KH 8682 AW.
- 6.) Rp.879.710,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Kijang Innova, KH 1477 AU.
- 7.) Rp.855.050,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Kijang Innova, KH 1363 AU.
- 8.) Rp.1.224.580,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Hillux 2.5 double cabin , KH 8782 AW.
- 9.) Rp.995.790,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Hillux 2.5 double cabin, KH 8709 AW.
- 10.) Rp.836.540,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Hillux 2.5 double cabin, KH 8645 AW.
- 11.) Rp.1.001.580,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Mitsubishi Triton, KH 8749 AW.
- 12.) Rp.702.840,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Rush, KH 1754 AU.
- 13.) Rp.574.325,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas).  
Mobil Toyota Avanza, KH 1293 AU.

Sedangkan Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar **Rp.25.145.489,00** juga merupakan pembayaran premi asuransi. Hal ini sudah dijelaskan juga di dalam laporan akhir tahun 2019.

Rincian pembayaran premi asuransi atau Beban Dibayar di Muka yang berjumlah sebesar **Rp.25.145.489,00, (beban tahun 2020 yang ada terlampir di kertas kerja)** yang terdapat di Neraca akhir tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

- 1.) Rp.4.991.556,00**  
Adalah polis asuransi gedung kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan Jenderal Soedirman no. 18, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
- 2.) Rp.3.822.506,00**  
Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BP3B, Jalan Cilik Riwut km. 7, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
- 3.) Rp.3.474.994,00**  
Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BBKPP Pundu, Kab. Kotim, Kalimantan Tengah.
- 4.) Rp.1.467.520,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Kijang Innova, KH 43.
- 5.) Rp.1.546.500,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Hillux, KH 8782 AW.
- 6.) Rp.949.692,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Avanza, KH 1293 AU.
- 7.) Rp.1.366.645,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Kijang Innova, KH 1477 AU.

- 8.) Rp.1.035.232,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Hillux 2.5 double cabin, KH 8645 AW.
- 9.) Rp.1.331.332,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Kijang Innova, KH 1363 AU.
- 10.) Rp.1.255.631,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Hillux 2.5 double cabin, KH 8709 AW.
- 11.) Rp.1.121.381,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Toyota Rush, KH 1754 AU.
- 12.) Rp.1.504.500,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Chevrolet Colorado Double Cabin, KH 8682 AW.
- 13.) Rp.1.278.000,00**  
Adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda 4 (mobil dinas). Mobil Mitsubishi Triton, KH 8749 AW.

**4. Persediaan****Rp.0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada seluruh unit kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.112.860.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

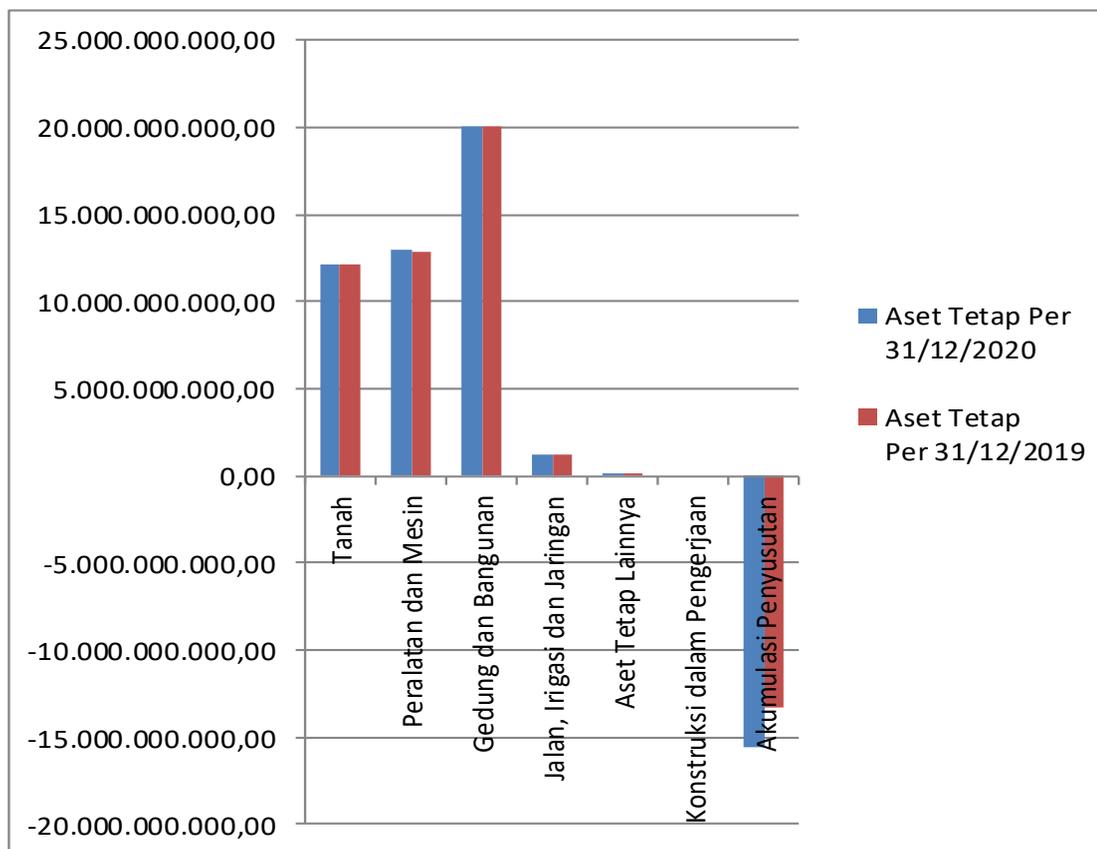
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	-	-
Bahan Perlengkapan Kantor	Rp	-	-
Cetak & Penggandaan	Rp	-	-
Persediaan Alat Listrik	Rp	-	-
Bibit Tanaman	Rp	-	112.860.000,00
Bahan Obat - Obatan	Rp	-	-
Bahan Kimia	Rp	-	-
Hibah Kpd Masyarakat	Rp	-	-
Benda Pos	Rp	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	<b>112.860.000,00</b>

**b. ASET TETAP****Rp.46.561.211.432,11**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.46.561.211.432,11. Sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.33.299.421.837,00. Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	12.176.336.000,00	-	-	12.176.336.000,00
Peralatan Dan Mesin	12.920.265.492,11	1.477.601.840,00	1.446.101.840,00	12.951.765.492,11
Gedung dan Bangunan	20.062.326.086,00	-	31.500.000,00	20.030.826.086,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	1.212.842.854,00	-	-	1.212.842.854,00
Aset Tetap Lainnya	189.441.000,00	-	-	189.441.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(13.261.789.595,11)	(2.248.471.408,89)	-	(15.510.261.004,00)
<b>Jumlah</b>	<b>33.299.421.837,00</b>	<b>(770.869.568,89)</b>	<b>1.477.601.840,00</b>	<b>31.050.950.428,11</b>

Uraian	Aset Tetap Per 31/12/2020	Aset Tetap Per 31/12/2019
Tanah	12.176.336.000,00	12.176.336.000,00
Peralatan dan Mesin	12.951.765.492,11	12.920.265.492,11
Gedung dan Bangunan	20.030.826.086,00	20.062.326.086,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.212.842.854,00	1.212.842.854,00
Aset Tetap Lainnya	189.441.000,00	189.441.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-15.510.261.004,00	-13.261.789.595,11
<b>Jumlah</b>	<b>31.050.950.428,11</b>	<b>33.299.421.837,00</b>



**4.1 Tanah****Rp.12.176.336.000,00.**

Tanah yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.12.176.336.000,00. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.12.176.336.000,00. Mutasi perubahan Tanah.

Uraian	Jumlah	
<b>Saldo Awal per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>12.176.336.000,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Kapitalisasi	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Pengurangan :</b>		
- Transfer keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>12.176.336.000,00</b>

Akumulasi Penyusutan

Rp.0,00

Nilai Buku per 31 Desember 2020

Rp.12.176.336.000,00

Secara rinci perbandingan nilai tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang yang dimiliki Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal	Di Luar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(BM) (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	7	7 (2+3+4) - (5+6)
Tanah Kantor Disbun	7.929.266.000,00	-	-	-	-	7.929.266.000,00
Tanah Gudang	183.594.000,00	-	-	-	-	183.594.000,00
Tanah UPT. BP3B	2.162.667.000,00	-	-	-	-	2.162.667.000,00
Tanah UPT. B2KP	1.431.055.000,00	-	-	-	-	1.431.055.000,00
Tanah Kebun B2KP	425.490.000,00	-	-	-	-	425.490.000,00
Tanah Kebun B2KP	44.264.000,00	-	-	-	-	44.264.000,00
Tanah Kebun B2KP	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.176.336.000,00</b>	-	-	-	-	<b>12.176.336.000,00</b>

#### a. Tanah Kantor

Selama tahun 2020 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk tanah kantor. Sehingga saldo per 31 Desember 2020 nilai Tanah Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sama dengan nilai saldo awalnya yaitu sebesar Rp.7.929.266.000,-

#### b. Tanah Gudang

Selama tahun 2020 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk tanah gudang. Sehingga saldo per 31 Desember 2020 nilai Tanah Gudang Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sama dengan nilai saldo awalnya yaitu sebesar Rp.183.594.000,-

**c. Tanah UPT. BP3B**

Selama tahun 2020 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk tanah UPT. BP3B. Sehingga saldo per 31 Desember 2020 nilai Tanah UPT. BP3B Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sama dengan nilai saldo awalnya yaitu sebesar Rp.2.162.667.000,-

**d. Tanah UPT. B2KP**

Selama tahun 2020 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk tanah UPT. B2KP. Sehingga saldo per 31 Desember 2020 nilai Tanah UPT. B2KP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sama dengan nilai saldo awalnya yaitu sebesar Rp.1.431.055.000,-

**e. Tanah Kebun B2KP**

Selama tahun 2020 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk tanah kebun UPT. B2KP. Sehingga saldo per 31 Desember 2020 nilai Tanah kebun UPT. B2KP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sama dengan nilai saldo awalnya yaitu sebesar Rp.425.490.000,-

**f. Tanah Kebun B2KP**

Selama tahun 2020 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk tanah kebun UPT. B2KP. Sehingga saldo per 31 Desember 2020 nilai Tanah kebun UPT. B2KP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sama dengan nilai saldo awalnya yaitu sebesar Rp.44.264.000,-

**4.2 Peralatan Dan Mesin** **Rp.12.951.765.492,11**

Peralatan Dan Mesin yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.12.951.765.492,11. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.12.920.265.492,11. Mutasi perubahan Peralatan Dan Mesin adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
<b>Saldo Awal per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>12.920.265.492,11</b>
<b>Penambahan:</b>		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Kapitalisasi	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	1.477.601.840,00
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
- Mutasi masuk	Rp	-
- Koreksi nilai	Rp	-
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.477.601.840,00</b>
<b>Pengurangan :</b>		
- Transfer keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	1.446.101.840,00
- Mutasi Kurang	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.446.101.840,00</b>
<b>Kenaikan / penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>12.951.765.492,11</b>

Akumulasi Penyusutan Rp.10.303.124.837,00

Nilai Buku per 31 Desember 2020 Rp.2.648.640.655,11

Secara obyektif perbandingan nilai dan mutasi Peralatan Dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi					Saldo 31/12/2020	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Tambah			Kurang				
		Belanja Modal	Di Luar BM	Reklas	Reklas	Penghap usan			
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+3+4)-(5+6)	9	10 (7-8)
Alat-alat Berat	-	-				-	-		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.413.266.255,00	-	-			-	-	4.413.266.255,00	
Alat Bengkel/Alat Ukur	171.875.000,00	-				-	-	171.875.000,00	
Alat Pertanian dan Peternakan	71.260.000,00	-				-	-	71.260.000,00	
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6.226.743.737,11	-	-	109.600.000,00	1.368.001.840,00	-	-	4.968.341.897,11	
Alat Studio dan Alat Komunikasi	213.884.500,00	-	-		78.100.000,00	-	-	135.784.500,00	
Alat-alat Kedokteran	-	-	-			-	-	-	
Alat Laboratorium	1.791.061.000,00					-	-	1.791.061.000,00	
Alat Keamanan	32.175.000,00					-	-	32.175.000,00	
Komputer	-			1.368.001.840,00				1.368.001.840,00	
<b>Jumlah</b>	<b>12.920.265.492,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.477.601.840,00</b>	<b>1.446.101.840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.951.765.492,11</b>	

**4.3 Gedung Dan Bangunan****Rp.20.030.826.086,00**

Gedung Dan Bangunan yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.20.030.826.086,00. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah Rp.20.062.326.086,00. Mutasi perubahan Gedung Dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
<b>Saldo Awal per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>20.062.326.086,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
- Pembelian	Rp	-
- Penambahan aset	Rp	-
- Kapitalisasi	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Mutasi masuk	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Pengurangan :</b>		
- Transfer keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Mutasi Kurang	Rp	31.500.000,00
- Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>Kenaikan/penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>20.030.826.086,00</b>

Akumulasi Penyusutan

Rp.4.905.898.576,00

Nilai buku per 31 Desember 2020

Rp.15.124.927.510,00

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi				Saldo 31/12/2020
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal	Di Luar BM/ Reklas Masuk	Reklasifikasi	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4) - (5+6)
Bangunan Gedung	20.062.326.086,00	-	-	31.500.000,00	-	20.030.826.086,00
Bangunan Monumen	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.062.326.086,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.030.826.086,00</b>

#### 4.4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Rp.1.212.842.854,00

Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang dimiliki Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.212.842.854,00. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.212.842.854,00. Mutasi perubahan Jalan Irigasi Dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
<b>Saldo Awal per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.212.842.854,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
- Pembelian	Rp	-
- Penambahan aset	Rp	-
- Kapitalisasi	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Pengurangan :</b>		
- Transfer keluar	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>1.212.842.854,00</b>

Akumulasi Penyusutan Rp.301.237.591,00

Nilai buku per 31 Desember 2020 Rp.911.605.263,00

Secara obyektif perbandingan nilai, mutasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi				Saldo 31/12/2020
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal	Di Luar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4) - (5+6)
Jalan dan Jembatan	205.567.707,00	-	-	-	-	205.567.707,00
Bangunan Air	649.603.465,00	-	-	-	-	649.603.465,00
Instalasi	267.584.682,00	-	-	-	-	267.584.682,00
Jaringan	90.087.000,00	-	-	-	-	90.087.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.212.842.854,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.212.842.854,00</b>

**4.5 Aset Tetap Lainnya Rp.189.441.000,00**

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.189.441.000,00. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.189.441.000,00. Mutasi perubahan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	
<b>Saldo Awal per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>189.441.000,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Kapitalisasi	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Pengurangan :</b>		
- Transfer keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan )	Rp	-
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>189.441.000,00</b>

Akumulasi Penyusutan Rp.0,00

Nilai buku per 31 Desember 2020 Rp.189.441.000,00

Secara obyek perbandingan nilai, tidak ada mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi				Saldo 31/12/2020
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal	Di Luar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4) - (5+6)
Buku dan Perpustakaan	47.561.000,00	-	-	-	-	47.561.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-	-
Tanaman	141.880.000,00	-	-	-	-	141.880.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>189.441.000,00</b>	<b>-</b>				<b>189.441.000,00</b>

**4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00. Mutasi perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
<b>Saldo Awal per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Kapitalisasi	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Mutasi tambah	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Pengurangan :</b>		
- Transfer keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Mutasi kurang	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan )	Rp	-
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Akumulasi Penyusutan Rp.0,00  
 Nilai buku per 31 Desember 2020 Rp.0,00

Secara obyektif perbandingan nilai, mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi				Saldo 31/12/2020
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal	Di Luar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4) - (5+6)
Bangunan Gedung	0,00	-	-	-	-	0,00
Bangunan Monumen	0,00	-	-	-	-	0,00
Jalan dan Jembatan	0,00	-	-	-	-	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	-	-	-	-	0,00
Instalasi	0,00	-	-	-	-	0,00
Jaringan	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap****Rp.15.510.261.004,00**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.15.510.261.004,00 dan Rp.13.261.789.595,11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan terlampir pada Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 12.176.336.000,00	Rp -	Rp 12.176.336.000,00
2	Peralatan Dan Mesin	Rp 12.951.765.492,11	Rp 10.303.124.837,00	Rp 2.648.640.655,11
3	Gedung Dan Bangunan	Rp 20.030.826.086,00	Rp 4.905.898.576,00	Rp 15.124.927.510,00
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp 1.212.842.854,00	Rp 301.237.591,00	Rp 911.605.263,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 189.441.000,00	Rp -	Rp 189.441.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 46.561.211.432,11</b>	<b>Rp 15.510.261.004,00</b>	<b>Rp 31.050.950.428,11</b>

**a. Aset Lain - Lainnya****Rp.2.076.680.000,00**

Aset Lain - Lainnya merupakan bagian Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.076.680.000,00. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.076.680.000,00. Mutasi perubahan Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah	
<b>Saldo Awal per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>2.076.680.000,00</b>	
<b>Penambahan:</b>			
- Pembelian	Rp	-	
- Transfer masuk	Rp	-	
- Kapitalisasi nilai perolehan	Rp	-	
- Mutasi Tambah	Rp	-	
- Reklasifikasi masuk	Rp	-	
- Pengalihan (masuk)	Rp	-	
- Koreksi atas double penghapusan	Rp	-	
-Koreksi atas double penghapusan (lain-lain)	Rp	-	
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	
<b>Pengurangan :</b>			
- Transfer keluar/hibah	Rp	-	
- Pengalihan (keluar)	Rp	-	
- Reklasifikasi keluar	Rp	-	
- Penghapusan aset lain - lain	Rp	-	
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan )	Rp	-	
- Akumulasi Penyusutan	Rp	-	
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	
<b>Kenaikan/penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>2.076.680.000,00</b>	

Secara obyektif perbandingan nilai, mutasi Aset Lain - Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi				Kurang	Saldo 31/12/2020
		Tambah		Kurang			
		Belanja Modal	Di Luar BM	Reklas / Koreksi	Penghapusan	Akumulasi Penyusutan	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+3+4) - (5+6)
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Akan Dihilangkan	2.076.680.000,00	-	-	-	-	-	2.076.680.000,00
Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.076.680.000,00</b>		-	-	-	-	<b>2.076.680.000,00</b>

**b. Aset Extra Comptable****Rp.51.302.334,64**

Aset extra comptable yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.51.302.334,64. Sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.51.302.334,64.

Mutasi perubahan Aset Extra comptable adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	
<b>Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>51.302.334,64</b>
<b>Penambahan :</b>		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Kapitalisasi nilai perolehan	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
<b>Jumlah (b)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Pengurangan :</b>		
- Transfer keluar/hibah	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan )	Rp	-
<b>Jumlah (c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan/penurunan (b-c)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>51.302.334,64</b>

Secara obyektif perbandingan nilai, tidak ada mutasi Aset Extra Comptable yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi				Saldo 31/12/2020
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal	Di Luar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4) - (5+6)
KIB B	44.102.334,64	-	-	-	-	44.102.334,64
KIB C	7.200.000,00	-	-	-	-	7.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>51.302.334,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.302.334,64</b>

**c. Aset Lainnya / Aset Lain - Lain**

**Rp.2.076.680.000,00**

Aset Lainnya adalah nilai buku atau total aset setelah penyusutan (ada di lampiran 7, di penjelasan khusus data aset). Nilai aset lainnya per 31 Desember 2020 yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp.2.076.680.000,00. Sedangkan nilai aset lainnya yang tercatat di neraca per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.076.680.000,00.

#### 5.1.4. KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri atas :

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** **Rp.20.971.346,00**

**1. Utang Beban** **Rp.20.971.346,00**

Utang Beban yaitu terdiri dari (Utang Beban Barang Dan Jasa) yang berupa pembayaran tagihan telepon (internet), air (PDAM), dan listrik (PLN) serta pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Utang Beban Pegawai) yang di bayarkan di tahun / bulan berikutnya, sehingga menjadi beban di tahun / bulan berikutnya.

Saldo Utang Beban tersebut di jurnal di tahun berjalan, kemudian di jurnal balik di tahun berikutnya (Utang Beban pada semester 2 / yang tercatat pada neraca di laporan keuangan akhir tahun).

Saldo **Utang Beban per tanggal 31 desember 2020** (Utang Beban Barang Dan Jasa serta Utang Beban Pegawai) adalah sebesar **Rp.20.971.346,00**, karena pembayaran tagihan telepon (internet), air (PDAM), dan listrik (PLN) serta pembayaran gaji atau tunjangan PNS dibayarkan pada tahun 2020. Saldo utang beban per tanggal 31 desember 2020 terdiri dari :

1. Pembayaran tagihan pemakaian telepon (internet) di bulan desember 2020, yang baru di bayarkan di tahun 2021, yaitu sebesar **Rp.8.070.000,00**.
2. Pembayaran tagihan pemakaian air (PDAM) di bulan desember 2020, yang baru di bayarkan di tahun 2021, yaitu sebesar **Rp.1.334.600,00**.
3. Pembayaran tagihan pemakaian listrik (PLN) di bulan desember 2020, yang baru di bayarkan di tahun 2021, yaitu sebesar **Rp.10.780.455,00**.
4. Pembayaran gaji atau tunjangan PNS yang baru di bayarkan di tahun 2021, yaitu sebesar **Rp.786.291,00**.

Sedangkan saldo **Utang Beban per tanggal 31 desember 2019** adalah Utang Beban Barang Dan Jasa sebesar **Rp.32.415.971,00**, karena pembayaran tagihan telepon (internet), air (PDAM), dan listrik (PLN) dibayarkan pada tahun 2020. Saldo utang beban per tanggal 31 desember 2019 terdiri dari :

1. Pembayaran tagihan pemakaian telepon (internet) di bulan desember 2019, yang baru di bayarkan di tahun 2020, yaitu sebesar **Rp.8.121.187,00**.
2. Pembayaran tagihan pemakaian air (PDAM) di bulan desember 2019, yang baru di bayarkan di tahun 2020, yaitu sebesar **Rp.3.726.400,00**.
3. Pembayaran tagihan pemakaian listrik di bulan desember 2019, yang baru di bayarkan di tahun 2020, yaitu sebesar **Rp.20.568.384,00**.

Sedangkan pembayaran gaji atau tunjangan PNS (Utang Beban Pegawai) tidak ada yang dibayarkan pada tahun 2020 sehingga tidak ada utang beban pegawai pada tahun 2020.

Utang Beban tersebut (yang senilai **Rp.32.415.971,00**) sudah di jurnal balik pada awal tahun 2020. Sehingga tidak terbaca lagi di neraca semester 1 tahun 2020.

<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>Rp.0,00</b>
---------------------------------	----------------

<b>5.1.5. EKUITAS DANA</b>	<b>Rp.,00</b>
----------------------------	---------------

Ekuitas Dana terdiri atas :

Ekuitas	Rp.,00
---------	--------

## D. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan - LO  
Rp.583.880.055,00

### D.1 Pendapatan – LO

Jumlah Pendapatan - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.583.880.055,00 dan Rp.474.006.180,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Uraian	Saldo		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Rp	%
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	583.880.055,00	474.006.180,00	109.873.875,00	23,17
<b>Total Pendapatan</b>	<b>583.880.055,00</b>	<b>474.006.180,00</b>	<b>109.873.875,00</b>	<b>23,17</b>

Pendapatan - LO berasal dari pendapatan retribusi daerah berupa retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan / pesangrahan / villa, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Beban Pegawai  
Rp.13.493.810.374,00

### D.2 Beban Pegawai - LO

Beban pegawai – LO pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.13.493.810.374,00 dan Rp.13.361.550.889,00. Rincian Beban Pegawai – LO untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	5.716.902.221,00	5.717.598.032,00	695.811,00	Utang Beban Pegawai yang tercatat di neraca akhir tahun 2020
Beban Tunjangan Keluarga - LO	451.408.000,00	451.498.480,00	90.480,00	Utang Beban Pegawai yang tercatat di neraca akhir tahun 2020
Beban Tunjangan Jabatan - LO	284.265.000,00	284.265.000,00	0,00	
Beban Tunjangan Fungsional - LO	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	205.010.000,00	205.010.000,00	0,00	
Beban Tunjangan Beras - LO	259.336.020,00	259.336.020,00	0,00	
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	19.339.828,00	19.339.828,00	0,00	
Beban Pembulatan Gaji - LO	73.014,00	73.014,00	0,00	
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	0,00	0,00	0,00	

Beban Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja-LO	0,00	0,00	0,00	
Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)-LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	3.714.400.000,00	3.714.400.000,00	0,00	
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja-LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Tambahan Penghasilan Uang Makan	1.264.600.000,00	1.264.600.000,00	0,00	
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – Lo	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
Beban Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber-LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa-LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Honorarium Pengelola Uang Dan Barang-LO	301.440.000,00	301.440.000,00	0,00	
Beban Moderator - LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber-LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap -LO	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	0,00	
<b>Total Beban</b>	<b>13.493.024.083,00</b>	<b>13.493.810.374,00</b>	<b>(786.291,00)</b>	

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.2.612.851.368,00 dan Rp.21.471.612.317,00.

Uraian	Saldo		Kenaikan/Penurunan	
	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Rp	%
Beban Bahan Pakai Habis	179.753.800,00	179.753.800,00	0,00	0
Beban Persediaan Bahan / Material	450.000,00	113.310.000,00	(112.860.000,00)	99,6
Beban Jasa Kantor	665.334.627,00	653.103.711,00	12.230.916,00	1,87
Beban Premi Asuransi	156.393.148,00	164.541.756,00	(8.148.608,00)	4,95
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	213.002.554,00	213.002.554,00	0,00	0
Beban Cetak dan Penggandaan	134.034.600,00	134.034.600,00	0,00	0
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0
Beban Makanan dan Minuman	59.050.000,00	59.050.000,00	0,00	0
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0
Beban Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0
Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0
Beban Perjalanan Dinas	1.094.054.947,00	1.094.054.947,00	0,00	0
Beban Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	0
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total Beban</b>	<b>2.504.073.676,00</b>	<b>2.612.851.368,00</b>	<b>(108.777.692,00)</b>	<b>4,16</b>

Beban Bahan Pakai  
Habis  
Rp. 179.753.800,00

### D.3.1 Beban Bahan Pakai Habis

Jumlah Beban Bahan Pakai Habis pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.179.753.800,00 dan Rp.696.013.400,00. Beban Bahan Pakai Habis merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang - barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Bahan Pakai Habis adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Persediaan ATK	133.479.900,00	133.479.900,00	0,00		406.637.000,00
Beban Persediaan Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00		0,00
Beban Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00		4.455.000,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	27.043.900,00	27.043.900,00	0,00		44.269.400,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Bahan Bakar Minyak / Gas	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Dokumentasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00		12.430.000,00
Beban Bahan Dekorasi	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00		143.975.000,00
Beban Baliho	0,00	0,00	0,00		29.472.000,00
Beban Bahan Diklat	0,00	0,00	0,00		13.775.000,00
Beban Bahan Perlombaan	0,00	0,00	0,00		9.000.000,00
Belanja Bahan Praktik Ketrampilan	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Bahan Habis Pakai Lainnya	0,00	0,00	0,00		11.220.000,00
<b>Total Beban</b>	<b>179.753.800,00</b>	<b>179.753.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>696.013.400,00</b>

*Beban Persediaan  
Bahan / Material  
Rp.113.310.000,00*

### D.3.2 Beban Persediaan Bahan / Material

Jumlah Beban Persediaan Bahan / Material pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.113.310.000,00 dan Rp.10.363.734.708,00.

Rincian Beban Persediaan Bahan / Material adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	450.000,00	450.000,00	0,00		1.452.000,00
Beban Persediaan Bahan / Bibit Tanaman	0,00	112.860.000,00	(112.860.000,00)	Selisih antara saldo bahan / bibit tanaman akhir tahun 2019 dengan saldo bahan / bibit tanaman akhir tahun 2020	7.641.716.708,00
Beban Persediaan Bahan Obat - Obatan	0,00	0,00	0,00		19.536.000,00
Beban Persediaan Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00		2.701.030.000,00
Beban Bahan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Beban</b>	<b>450.000,00</b>	<b>113.310.000,00</b>	<b>(112.860.000,00)</b>		<b>10.363.734.708,00</b>

*Beban Jasa Kantor  
Rp.653.103.711,00*

### D.3.3 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing

- masing sebesar Rp.653.103.711,00 dan Rp.1.686.114.560,00,00. Beban Jasa Kantor adalah konsumsi atas jasa - jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Jasa Telepon	93.073.014,00	93.021.827,00	51.187,00	Utang beban di awal tahun 2020, yang sudah di jurnal balik di semester 1 tahun 2020	106.701.936,00
Beban Jasa Air	20.814.000,00	18.422.200,00	2.391.800,00	Utang beban di awal tahun 2020, yang sudah di jurnal balik di semester 1 tahun 2020	26.000.400,00

Beban Jasa Listrik	199.199.813,00	189.411.884,00	9.787.929,00	Utang beban di awal tahun 2020, yang sudah di jurnal balik di semester 1 tahun 2020	266.188.074,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00		21.800.000,00
Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.754.800,00	2.754.800,00	0,00		2.630.400,00
Beban Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Jasa Service Peralatan / Perlengkapan Kantor	28.493.000,00	28.493.000,00	0,00		35.175.000,00
Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00		91.800.000,00
Beban Uang Hadiah Lomba / Prestasi Untuk Diberikan Kepada Pihak ketiga / Masyarakat	0,00	0,00	0,00		7.500.000,00
Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00		1.128.318.750,00
<b>Total Beban</b>	<b>665.334.627,00</b>	<b>653.103.711,00</b>	<b>12.230.916,00</b>		<b>1.686.114.560,00</b>

*Beban Premi Asuransi  
Rp.164.541.756,00*

#### D.3.4 Beban Premi Asuransi

Beban Premi Asuransi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.164.541.756,00 dan Rp.132.821.660,00,00. Rincian beban Premi Asuransi adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	54.411.864,00	54.411.864,00	0,00		31.988.955,00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	101.981.284,00	110.129.892,00	(8.148.608,00)	Selisih yang disebabkan karena pembayaran di muka, sebelum jatuh tempo. Tercatat sebagai Beban Dibayar Dimuka di Neraca.	100.832.705,00
<b>Total Beban</b>	<b>156.393.148,00</b>	<b>164.541.756,00</b>	<b>(8.148.608,00)</b>		<b>132.821.660,00</b>

*Beban Perawatan  
Kendaraan Bermotor  
Rp.213.002.554,00*

#### D.3.5 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.213.002.554,00 dan Rp.323.773.605,00. Rincian beban Perawatan Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Jasa Service	48.418.306,00	48.418.306,00	0,00		80.108.153,00
Beban Penggantian Suku Cadang	72.653.400,00	72.653.400,00	0,00		32.017.552,00
Beban BBM / Gas & Pelumas	71.056.648,00	71.056.648,00	0,00		194.562.000,00
Beban STNK	20.874.200,00	20.874.200,00	0,00		17.085.900,00
<b>Total Beban</b>	<b>213.002.554,00</b>	<b>213.002.554,00</b>	<b>0,00</b>		<b>323.773.605,00</b>

Terdapat penyesuaian beban yang bersifat akrual pada beban STNK, Beban STNK meliputi pembayaran STNK. Untuk pembayaran STNK dimanfaatkan untuk 1 (satu) tahun ke depan, sehingga saat terjadi lintas periode (melewati 31 Desember tahun berjalan)

akan memunculkan akun “beban dibayar dimuka”. Penyesuaian juga dilakukan atas beban dibayar dimuka akibat transaksi tahun 2020 yang disesuaikan menjadi beban pada tahun 2020.

Tetapi pada laporan akhir tahun 2020, perhitungan jumlah pembayaran STNK sudah tidak di masukkan lagi di Neraca (Beban Dibayar Dimuka).

*Beban Cetak dan  
Penggandaan  
Rp.134.034.600,00*

### D.3.6 Beban Cetak dan Penggandaan

Beban Cetak dan Penggandaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.134.034.600,00 dan Rp.523.677.800,00. Rincian Beban Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Cetak	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00		101.250.000,00
Beban Penggandaan	103.379.600,00	103.379.600,00	0,00		368.062.800,00
Beban Penjilidan	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00		54.365.000,00
<b>Total Beban</b>	<b>134.034.600,00</b>	<b>134.034.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>523.677.800,00</b>

*Beban Sewa Rumah /  
Gedung / Gudang /  
Parkir  
Rp.2.000.000,00*

### D.3.7 Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.2.000.000,00 dan Rp.242.700.000,00.

Saldo beban sewa rumah / gedung / gudang / parkir terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		175.700.000,00
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemu an	0,00	0,00	0,00		67.000.000,00
<b>Total Beban</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>242.700.000,00</b>

*Beban Sewa Sarana  
Mobilitas  
Rp.0,00*

### D.3.8 Beban Sewa Sarana Mobilitas

Beban Sewa Sarana Mobilitas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing- masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.8.000.000,00.

Saldo beban sewa sarana mobilitas terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000.000,00</b>

*Beban Sewa  
Perlengkapan Dan  
Peralatan Kantor  
Rp.0,00*

### D.3.9 Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Saldo Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Sewa Pakaian Adat Tradisional	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

*Beban Makanan Dan  
Minuman  
Rp.59.050.000,00*

### D.3.10 Beban Makanan dan Minuman

Beban Makanan Dan Minuman pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.59.050.000,00 dan Rp.235.790.000,00.

Saldo makanan dan minuman terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00		9.460.000,00
Beban Makanan Dan Minuman Rapat	59.050.000,00	59.050.000,00	0,00		153.310.000,00

Beban Makanan Dan Minuman Pelatihan	0,00	0,00	0,00		73.020.000,00
<b>Total Beban</b>	<b>59.050.000,00</b>	<b>59.050.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>235.790.000,00</b>

*Beban Pakaian Dinas  
Dan Atributnya  
Rp.0,00*

#### **D.3.11 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya**

Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Saldo beban pakaian dinas dan atributnya terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban PDH	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

*Beban Pakaian Khusus  
Dan hari - Hari Tertentu  
Rp.0,00*

#### **D.3.12 Beban Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu**

Beban Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.118.550.000,00.

Saldo beban pakaian khusus dan hari - hari tertentu terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00		118.550.000,00
Beban Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.550.000,00</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp.1.094.054.947,00*

### **D.3.13 Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.1.094.054.947,00 dan Rp.7.000.936.584,00.

Rincian atas Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Belanja 31 Desember 2020</b>	<b>Beban 31 Desember 2020</b>	<b>Lebih / Kurang</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Beban 2019</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	838.413.000,00	838.413.000,00	0,00		4.925.021.560,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	255.641.947,00	255.641.947,00	0,00		2.075.915.024,00
<b>Total Beban</b>	<b>1.094.054.947,00</b>	<b>1.094.054.947,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.000.936.584,00</b>

*Beban Jasa Konsultasi  
Rp.0,00*

### **D.3.14 Beban Jasa Konsultasi**

Jumlah Beban Jasa Konsultasi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Saldo beban jasa konsultasi terdiri dari rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Belanja 31 Desember 2020</b>	<b>Beban 31 Desember 2020</b>	<b>Lebih / Kurang</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Beban 2019</b>
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00		0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

*Beban Barang Untuk  
Diserahkan Kepada  
Masyarakat / Pihak  
Ketiga Rp.0,00*

### **D.3.15 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Saldo beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

*Beban Kursus,  
Pelatihan, Sosialisasi  
dan Bimbingan Teknis  
PNS  
Rp.0,00*

#### **D.3.16 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**

Jumlah Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.139.500.000,00.

Saldo Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS terdiri dari rincian sebagai berikut :

Uraian	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Lebih / Kurang	Keterangan	Beban 2019
Beban Kursus – Kursus Singkat / Pelatihan	0,00	0,00	0,00		139.500.000,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.500.000,00</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp.0,00*

#### **D.4 Beban Hibah**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.3.507.372.000,00.

Uraian	Saldo		Kenaikan/Penurunan	
	Belanja 31 Desember 2020	Beban 31 Desember 2020	Rp	%
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp.2.241.555.145,00

#### D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Saldo beban penyusutan dan amortisasi pada semester 2 tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.241.555.145,00

Uraian	Saldo		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	1.630.380.863,00	1.851.247.212,00	(220.866.349,00)	11,93
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	553.493.345,00	547.698.080,00	5.795.265,00	1,05
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.680.937,00	35.826.355,00	21.854.582,00	61
<b>Total Beban</b>	<b>2.241.555.145,00</b>	<b>2.434.771.647,00</b>	<b>(193.216.502,00)</b>	<b>7,93</b>

Beban Lain-lain  
Rp.0,00

#### D.6 Beban Lain - Lain

Beban lain – lain merupakan akun yang digunakan untuk memasukkan beban - beban yang tidak termasuk dalam barang dan jasa. Dinas Perkebunan pada 31 Desember 2020 memiliki beban lain - lain sebesar Rp.0,00 yang berupa beban lain-lain dari pembayaran Jasa Premi Asuransi dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor seperti biaya administrasi dan biaya denda. Sedangkan pada 31 Desember 2019, Dinas Perkebunan memiliki beban lain – lain sebesar Rp.806.000,00.

Uraian	Saldo		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Rp	%
Beban Lain-lain	0,00	806.000,00	(806.000,00)	100
<b>Total Beban</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>(806.000,00)</b>	<b>100</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### *Ekuitas Awal*

*Rp.35.481.691.355,00*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.35.481.691.355,00 dan Rp.37.463.094.132,00.

### *Surplus (defisit) LO*

*(Rp.17.764.336.832,00)*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing defisit sebesar (Rp.17.764.336.832,00) dan (Rp.40.302.461.048,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus / defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

### *Koreksi Ekuitas Lainnya*

*(Rp.6.916.263,89)*

#### **E.3 Koreksi Ekuitas Lainnya**

Nilai koreksi ekuitas lainnya untuk periode berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar (Rp.6.916.263,89) dan (Rp.3,00). Koreksi ekuitas lainnya terdiri dari penyesuaian - penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan / pengurangan nilai ekuitas.

### *Ekuitas Akhir*

*Rp.33.123.655.963,11*

#### **E.4 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing - masing sebesar Rp.33.123.655.963,11 dan Rp.35.481.691.355,00. Nilai ekuitas didapat dari penghitungan ekuitas awal ditambah / dikurangi surplus / defisit dan dampak kumulatif perubahan.

## **BAB VI PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah semester 2 Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah semester 2 Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip - Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis / dasar kas modifikasi. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah semester 2 Tahun Anggaran 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2021

**PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**Ir. H. SRI SUWANTO, M.S**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670416 199803 1 002

---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

---

1. Penjabaran LRA Pendapatan Dan Belanja
2. Berita Acara Rekonsiliasi
3. Rekapitulasi SP2D
4. Realisasi APBD s/d Desember 2020 (SPJ Fungsional / Rekap)
5. Surat Tanda Setoran
6. Register Penutupan Kas
7. Copy Rekening Bank per 31 Desember 2020

